



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022  
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN  
14-18 OKTOBER 2021**

\*

\*

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

\*

\*

**JAKARTA 2021**



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2021-2022  
KE PROVINSI SULAWESI SELATAN  
14-18 OKTOBER 2021**

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
  - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 13 Juli 2021.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Agustus 2021

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat, serta *stakeholder* di bidang kelautan dan perikanan, lingkungan hidup dan kehutanan, serta pertanian sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan:

2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sulawesi Selatan; serta
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program Pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.

#### **C. RUANG LINGKUP**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IV DPR RI, yaitu Bidang Pertanian, Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

#### **D. SUSUNAN TIM**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh Anggia Erma Rini, MKM (Wakil Ketua Komisi IV/F-PKB), dengan susunan anggota tim terlampir.

#### **E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 14-18 Oktober 2021 dan bertempat di Kota Makassar dan Kabupaten Maros.

#### **F. LOKASI KUNJUNGAN KERJA**

1. Pelabuhan Perikanan Untia, Kota Makassar;
2. Lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Untia, Kota Makassar;
3. Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang, Kec. Panakukang, Kota Makassar;
4. Taman Nasional Bantimurung, Kabupaten Maros; dan
5. Balai Penelitian Tanaman Serealia, Kabupaten Maros.

## II. GAMBARAN UMUM

### Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur dengan luas wilayah 46.717,48 km<sup>2</sup>.

Di daratan, provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Sulawesi Tenggara di timur. Kontur daratan dari utara ke selatan membentang rangkaian pegunungan yang dipisahkan oleh Danau Tempe di pertengahan. Puncak tertinggi di Sulawesi, Gunung Rantekombola, menjulang di bagian utara-tengah provinsi. Terdapat juga beberapa aliran sungai seperti Walanae, Sadang, Kobo, Kalaena, Koladu, dan Kongkong.

Di perairan, Provinsi ini dibatasi oleh Laut Flores di selatan, Teluk Bone di timur, sedangkan sebelah barat dibatasi oleh Selat Makassar yang merupakan pintu masuk utama massa air dari Samudera Pasifik yang lebih dikenal dengan Arus Lintas Indonesia (*Indonesia Through Flow*). Arus ini memiliki beberapa potensi, salah satu yang masih diteliti adalah kemungkinannya sebagai salah satu faktor yang turut mempengaruhi iklim global.

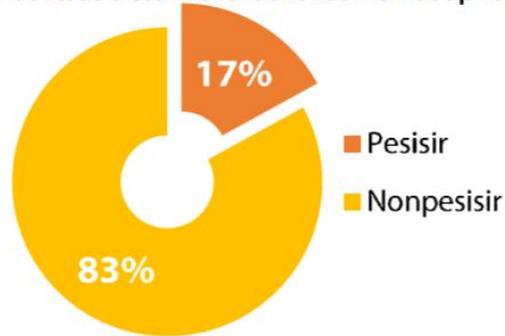
Hasil analisis terhadap dua stasiun klimatologi di Kota Makassar menunjukkan bahwa rata-rata suhu udara periode 2019 – 2020 mengalami kenaikan 5,05 persen. Namun, untuk curah hujan pada periode yang sama mengalami penurunan sekitar 17,99 persen.

#### Statistik Geografi dan Iklim

Uraian	Satuan	2020
Luas Wilayah	km <sup>2</sup>	46.717,48
Jumlah Kabupaten	kabupaten	21,00
Jumlah Kota	kota	3,00
Jumlah Kecamatan	kecamatan	310,00
Jumlah Desa/Kelurahan	desa/kelurahan	3.051,00
Kecepatan Angin*	m/detik	1,92
Kelembapan Udara*	%	77,65
Tekanan Udara*	mb	1.010,76
Suhu Udara*	Celcius	28,47
Curah Hujan*	mm <sup>3</sup>	3.009,00

Sumber: BPS 2021

Persentase Desa Menurut Lokasi Terhadap Laut



Sumber: BPS 2021

Populasi penduduk Sulawesi Selatan tahun 2020 tercatat lebih dari 9,07 juta jiwa yang mana dalam setiap 1 kilometer persegi rata-rata dihuni sebanyak 194 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki dengan nilai rasio jenis kelamin sebesar 98,59 persen yang berarti dari setiap 100 penduduk perempuan di Sulawesi Selatan terdapat 98-99 penduduk laki-laki. Secara nasional, berdasarkan hasil SP2020 populasi penduduk Sulawesi Selatan menyumbang 3,36 persen dari total populasi penduduk Indonesia atau sekitar 45,61 persen dari total populasi penduduk yang mendiami Pulau Sulawesi. Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi masih menjadi wilayah dengan jumlah populasi terbanyak serta dengan tingkat kepadatan tertinggi dibandingkan dengan 23 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di wilayah Sulawesi Selatan. Kota Makassar bertambah penduduknya sekitar 85 ribu jiwa dibandingkan dengan hasil pencatatan di tahun 2010 lalu. Setelah 10 tahun beberapa wilayah bahkan mengalami penambahan penduduk lebih dari 20 persen diantaranya Tana Toraja sebesar 27,01 persen; Palopo sebesar 24,84 persen, Luwu Timur sebesar 22,08 persen; dan Toraja Utara sebesar 20,45 persen. Jumlah Penduduk usia produktif juga masih mendominasi wilayah Sulawesi Selatan dengan persentase sebesar 68,57 persen atau sebanyak 6,22 juta jiwa. Pada usia tersebut saat ini merupakan penduduk yang lahir pada tahun 2004-1954 atau bisa disebut dengan penduduk yang termasuk kategori generasi Z, milenial, generasi X, dan Generasi Baby Boomer. Dengan Komposisi tersebut, rasio ketergantungan penduduk Sulawesi Selatan tahun 2020 menjadi sebesar

45,84 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 45-46 penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas).

### **Sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan**

Sektor Pertanian, Perkebunan, serta Kelautan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian Sulawesi Selatan dengan kontribusi sekitar 21,70 persen dari seluruh sektor ekonomi di tahun 2020. PDRB lapangan usaha pertanian mengalami kontraksi sebesar 0,83 persen karena terdampak pandemi. Berbanding lurus dengan kontribusi ekonomi, penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian juga mendominasi lapangan usaha. 37,98 persen pekerja di Sulawesi Selatan di periode Februari 2021, bekerja di sektor pertanian. Diikuti sektor perdagangan 17,41 persen dan konstruksi 7,28 persen.

Berdasarkan hasil Survei KSA, realisasi panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2020 sebesar 0,98 juta hektar, atau mengalami penurunan sekitar 33,93 ribu hektar (3,36 persen) dibandingkan 2019 yang mencapai 1,01 juta hektar. Puncak panen padi pada 2020 tidak mengalami pergeseran dibanding 2019. Pada 2020, puncak panen terjadi pada bulan Agustus, yaitu mencapai 0,19 juta hektar, sementara puncak panen pada 2019 terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 0,21 juta hektar.

Melihat produksi daging, sapi menjadi jenis ternak dengan produksi daging tertinggi sebesar 15.310,68 ribu kg. Produksi daging unggas untuk ayam kampung 7.449.636 ton; ayam petelur 4.572.648 ton; ayam pedaging 842.720.052 ton; dan itik 1.713.036 ton.

Produksi perikanan di Provinsi Sulawesi Selatan didominasi dari perikanan tangkap. Dimana pada tahun 2019 mencapai 396.757 ton. Perikanan menjadi salah satu daya tarik masyarakat di Sulawesi Selatan yang digambarkan bahwa rumah tangga perikanan di tahun 2019 meningkat jika dibandingkan tahun 2018. Dimana jumlah rumah tangga perikanan di 2019 meningkat 12.625 rumah tangga dibandingkan 2018.

Sementara untuk hasil perkebunan pada tahun 2020 di Sulawesi Selatan ialah kelapa sawit 273.712 ton; kelapa 58.497 ton; karet 1.320 ton; kopi 34.427 ton; kakao 106.582 ton; tebu 2.231 ton; dan tembakau 1.137 ton.

Nilai ekspor tahun 2020 Sulawesi Selatan tertinggi adalah komoditas ikan dan udang sebesar 137,99 juta US\$. Diikuti rumput laut dan ganggang lainnya sebesar 111,77 juta US\$ dan kakao sebesar 61,95 juta US\$. Dari sisi volume, ekspor ikan dan udang sebesar 18,40 ton, rumput laut dan ganggang sebesar 117,92 ton, kakao sebesar 16,09 ton, kopi teh dan rempah-rempah sebesar 15,35 ton, buah-buahan sebesar 13,79 ton, kayu barang dari kayu sebesar 49,23 ton, dan lak getah damar sebesar 14,36 ton.

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Nilai NTP < 100 menunjukkan petani mengalami defisit, yaitu tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. NTP Sulawesi Selatan 2019- 2020 masih di bawah 100 yang berarti perlu ada penanganan mengingat petani masih mengalami defisit.

### **III. HASIL KUNJUNGAN**

#### **BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

##### **Kunjungan ke Pelabuhan Perikanan Untia, Kota Makassar**

Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hal ini dapat dilihat pada realisasi laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan melalui kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sumbangan komoditas unggulan produk perikanan. Laju pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan dalam 10 tahun terakhir telah mencapai rata-rata 7,81%, setiap tahunnya dan menyumbang devisa negara melalui ekspor yang mencapai 8,2%, perkembangan pangsa pasar domestik

yang mencapai 10% dan peningkatan konsumsi ikan perkapita yang mencapai 4,9%.

Volume produksi perikanan Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 1,1% yaitu sekitar 3.941.648,8 ton pada tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 4.098.211,8 ton pada tahun 2020. Kenaikan produksi perikanan ini ditopang oleh peningkatan produksi perikanan budi daya sebesar 0,7 % dan perikanan tangkap sebesar 5,6%. Peningkatan volume produksi tersebut dibarengi dengan peningkatan nilai produksi perikanan budi daya sebesar 11,4 % dan perikanan tangkap sebesar 8,7%.

Letak Provinsi Sulawesi Selatan berada pada selat strategis yakni Selat Makassar, yang merupakan lalu lintas maritim global. Selain itu kami juga memiliki wilayah perairan yang produktif yaitu Laut Flores dan Teluk Bone. Sulawesi Selatan merupakan jalur ekonomi global dan jalur keamanan laut internasional sehingga memiliki keunggulan sekaligus ketergantungan yang tinggi terhadap bidang kelautan.

Pada kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Untia, Kota Makassar, Komisi IV DPR RI meninjau fasilitas Pelabuhan. Tim juga melakukan dialog dan sesi tanya jawab dengan stakeholder Perikanan. Muncul beberapa pertanyaan, aspirasi serta masukan diantaranya:

1. Apakah kapal *one day fishing* wajib membuat syarat persetujuan berlayar (SPB) & Surat Laik Operasi (SLO)?
2. Bangga atas pembangunan pelabuhan perikanan. Namun Pelabuhan belum berjalan dengan maksimal. Harapannya semua pihak dapat bekerja keras untuk memanfaatkan Pelabuhan yang sudah dibangun.
3. Keluhan para eksportir terkait tingginya harga sewa container yang membuat para ekportir kesulitan untuk ekspor. Para eksportir berharap dicarikan solusi atas masalah yang ada.

Pertanyaan dan aspirasi masyarakat ditanggapi langsung oleh Komisi IV DPR RI serta mitra Komisi IV DPR RI dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Dirjen Perikanan Tangkap.

1. Mengurusi dokumen Syarat persetujuan berlayar (SPB) & Surat Laik Operasi (SLO) adalah sebuah kewajiban. Biaya SPB dan SLO adalah gratis. Cara daftarnya juga dapat menggunakan aplikasi. Fungsi dari SPB dan SLO adalah untuk memastikan bahwa kapal yang digunakan nelayan layak beroperasi. Selain itu, pelabuhan setempat dapat memantau kapal nelayan yang berangkat ke laut, sehingga apabila terjadi sesuatu maka otoritas setempat dapat mengetahui.
2. Pelabuhan akan segera difungsikan. Saat ini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang bekerja keras untuk membentuk organisasi di Pelabuhan Perikanan Untia agar segera disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Untuk keluhan masyarakat mengenai PPN dan naiknya biaya container, pihak KKP akan segera menindaklanjuti masalah tersebut. Namun mengenai isu adanya kenaikan PPN, hal tersebut tidak ditanggapi karena bukan domain Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## **BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

### **Kunjungan ke lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Untia, Kota Makassar**

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Jeneberang Saddang bertanggung jawab untuk melaksanakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis di Provinsi Sulawesi Selatan. Luas Lahan Kritis di Wilayah kerja BPDASHL Jeneberang Saddang seluas 385.573,22 ha dengan kategori kritis seluas 129.019,16 ha dan sangat kritis seluas 256.554,06 ha. Pada tahun ini BPDAS Jeneberang Saddang melaksanakan Kegiatan RHL P0 tahun 2021 seluas 2.500 ha dan RHL Pasca Bencana Luwu Utara 2021 seluas 50 Ha. BPDAS Jeneberang Saddang pada tahun ini melaksanakan kegiatan pemeliharaan RHL tahun ke-2 atau P2 seluas 19.600 ha.

Tabel Progres Per Kegiatan ( Per- 30 September 2021)

RHL Murni : Pola Agroforestry

	Total 2021	Sampai Sept 2021	Persentase
Luas	2.500 ha	2.092 ha	83,6%
Bibit	1.000.000 batang	836.000 batang	83,6%
HOK	68.079 HOK	46.615 HOK	68,5%

RHL Pasca Bencana Luwu Utara

	Total 2021	Sampai Sept 2021	Persentase
Luas	50 ha	16 ha	32%
Bibit	22.000 batang	6.400 batang	29%
HOK	1.328 HOK	418 HOK	31,5%

Pemeliharaan RHL Tahun Ke-2 (P2)

	Total 2021	Sampai Sept 2021	Persentase
Luas	19.600 ha	16.107,73 ha	82,2%
Bibit	1.919.020 batang	1.645.883 batang	85,8%
HOK	351.345 HOK	223.563 HOK	63,6%

BPDAS Jeneberang Saddang tahun 2021 mendapatkan penugasan untuk melaksanakan RHL Mangrove dari APBN seluas 50 ha untuk P0 dan 25 Ha untuk pemeliharaan P1.

Tabel Distribusi RHL Mangrove BPDAS Jeneberang Saddang Tahun 2021

No	Lokasi	Luas (ha)	Keterangan
1	Kabupaten Pinrang, Paria	35	P0
2	Kabupaten Pinrang, Bababinanga	8	P0
3	Kota Makassar, Untia	5	P0
4	Kabupaten Sinjai, Tongke-tongke	2	P0
5	Kabupaten Wajo, Doping-doping	25	P1

Rehabilitasi hutan mangrove perlu dilakukan karena hutan mangrove memiliki banyak fungsi dan manfaat, sebagai sabuk hijau bagi area pesisir

dan sekitarnya, habitat bagi berbagai macam satwa serta menjadi tempat beberapa jenis ikan bertelur. Kawasan hutan mangrove juga berperan dalam mengatasi dan mencegah abrasi pantai. Berdasarkan data tahun 2021, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sebaran mangrove seluas 7.931,29 ha yang berada di dalam kawasan hutan serta 128.491,91 ha di luar kawasan hutan.

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI di lokasi RHL Mangrove Untia melakukan penanaman secara simbolis mangrove dan dialog dengan relawan pelaksana RHL yaitu Kelompok Sumber Daya Pesisir Lestari. Pada kesempatan diskusi dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, perwakilan kelompok menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya BPDAS Jeneberang Sadding yang sudah melaksanakan kegiatan RHL Mangrove di Untia, dan berharap ke depan agar kegiatan RHL di Untia ditambah untuk lahan-lahan yang kosong. Selain aspirasi tambahan kegiatan RHL Mangrove, perwakilan kelompok juga meminta bantuan kapal dan pengembangan ekowisata mangrove.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR-RI sangat mengapresiasi atas kerja relawan yang dengan segenap hati menjalankan passionnya sekaligus melestarikan mangrove di lokasi tersebut. Dirinya meminta pemerintah daerah dapat memberikan atensi lebih kepada para relawan tersebut. Komisi IV DPR-RI juga mendorong Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat berkomitmen menyediakan bibit mangrove dan memperhatikan kesejahteraan para relawan.

Sedangkan usulan untuk pengembangan ekowisata, agar lahan-lahan kosong yang ada agar ditanami dengan Mangrove dan dijaga agar tumbuh dengan baik. Jika mangrove sudah tumbuh dengan baik maka dapat di kembangkan menjadi lokasi ekowisata bersama pemerintah daerah.



Lokasi Untia  
 Desa Untia  
 Kecamatan Biringkanaya  
 Kota Makassar  
 Provinsi Sulawesi Selatan  
 Luas 5 ha  
 Pola Intensif  
 Pelaksana Kelompok  
 Sumber Daya Pesisir Lestari  
 Pemangku CDK Wil I Dinas  
 Kehutanan Prov  
 Sulawesi Selatan

Kordinat;

119°28'11,852" sd 119°28'26,306" LS

5°3'48,107" sd 5°3'44,866" BT

#### RHL Mangrove P0 Untia

	Target	Realisasi	Persentase
Luas	5 ha	4 ha	80%
Bibit	18.150 batang	13.200 batang	72,73%
Tenaga Kerja	251 HOK	130 HOK	51,79%

Mitra Komisi IV DPR RI yang hadir pada kunjungan kerja di Untia antara lain Plt Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan, Kepala P3E Sulawesi, Kepala Balai PDASHL Jeneberang-Saddang, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

#### **Kunjungan ke Taman Nasional Bantimurung, Kabupaten Maros**

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (TN. Babul) di Provinsi Sulawesi Selatan ditunjuk menjadi kawasan konservasi c.q. Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung seluas

±43.750 Ha, terletak di wilayah administrasi Kabupaten Maros dan Pangkep (sebagian Kabupaten Bone) Provinsi Sulawesi Selatan. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung merupakan ekosistem karst yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dengan jenis-jenis flora dan fauna endemik, unik dan langka, keunikan fenomena alam yang khas dan indah, serta sebagai daerah resapan air.

Taman Nasional Bantimurung memiliki keindahan alam yang luar biasa untuk dikembangkan menjadi obyek tujuan ekowisata atau wisata alam. Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI berkunjung ke Santuary Kupu-kupu dan air terjun Bantimurung yang keduanya berada di Kawasan Wisata Bantimurung. Rombongan juga mengunjungi *display room* untuk mengamati awetan beragam jenis kupu-kupu penghuni Bantimurung Bulusaraung sebagai media edukasi, penelitian, dan ekowisata.

Apresiasi yang positif dari Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dan penting untuk dikembangkan kembali, karena memang contoh kerja sama yang baik antara pemda, balai, dan masyarakat juga. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dijuluki *The Kingdom of Butterfly*, artinya di dunia ini satu-satunya spesies kupu-kupu yang jumlah sebanyak 245 spesies (jenis) dan habitat spesies lain yang lain juga dilindungi.

Komisi IV DPR-Ri mendorong Pemprov dan Pemkab untuk dapat memberikan atensi yang cukup besar bagi kawasan Taman Nasional Bantimurung, sejalan dengan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (RUU KSDAE) yang sedang dibahas di Komisi IV DPR RI termasuk di dalamnya Taman Nasional.

Kerja sama dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan Taman Nasional Bantimurung sudah cukup terjalin, hanya tinggal menaikkan jumlah pengunjung. Pemkab Maros juga perlu memperbaiki sarana prasarana di dalamnya, begitupun dengan membentuk program yang dapat mengajak masyarakat berwisata ke Taman Wisata Nasional Bantimurung, sehingga lokasi tersebut dapat menjadi alternatif menaikkan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI berkesempatan berdiskusi dan beberapa kelompok masyarakat yang menjadi mitra Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Karena sejak tahun 2015 Balai Taman Nasional melakukan kegiatan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yaitu masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan antara lain pembentukan kelompok tani/binaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, penyusunan rencana kerja tahunan, sampai pembentukan kelompok kemitraan konservasi.

Salah satu kelompok tani yang hadir berdiskusi adalah Kelompok Wanita Tani Semangat Baruga atau yang disingkat dengan istilah KWTH Semangat Baruga adalah salah satu kelompok binaan Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang beralamat di Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Tahun 2018 Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung melakukan pelatihan pembuatan minuman jahe instan, karena Desa Barugae memiliki banyak tanaman jahe yang apabila panen raya harga jahe akan jatuh. Dengan adanya pelatihan pembuatan minuman herbal berbahan jahe ternyata dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa Barugae dari yang awalnya Rp1.200.000,00/anggota kini sampai dengan bulan Juli 2020 terus mengalami peningkatan terutama penjualan produk jahe instant dimasa pandemi Covid-19 menjadi Rp5.000.000,00/anggota (jumlah anggota kelompok sebanyak 33 orang ditambah 4 perangkat terdiri dari ketua, wakil ketua, sekertaris, dan bendahara kelompok).

Produk jahe instan ini ternyata banyak peminatnya, namun dibutuhkan suatu wadah untuk mengatur manajemen pengelolaanya, sehingga pada tahun 2019 melalui Pemerintah Desa Barugae mengundang pihak Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk membantu membentuk wadah petani yang ada di desa mereka dengan membentuk kelompok wanita tani semangat baruga, tak lupa pula, diawal pembentukan kelompok wanita tani semangat baruga, pihak Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung melakukan pengukuran pendapatan ekonomi masing-masing anggota dengan memberikan kuisioner untuk diisi oleh setiap orang, sehingga dapat diketahui pendapatan masing-masing anggota kelompok yakni sebesar rata-rata

Rp1.200.000,00/bulan per September 2019. Dengan adanya wadah kelompok usaha yang dibina oleh pihak Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dari tahun 2018 sampai Juli 2020 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. data perolehan pendapatan ekonomi bagi kelompok KWTH Semangat Baruga termuat dalam laporan keuangan kelompok.

KWTH Semangat Baruga berinisiatif untuk menghijaukan hutan di sekitaran desa mereka dengan cara mendonasikan Rp1.000,00 untuk dan konservasi (program ini berasal dari sumbangan hasil penjualan produk jahe instant Rp1.000,00 untuk 1 pohon setiap pembelian 1 produk jahe instant). Saat ini dana donasi Rp1.000,00 untuk 1 pohon telah terkumpul sebanyak Rp7.000.000,00 dari hasil penjualan produk jahe instant sampai dengan bulan Juli 2020. Dana ini terus akan bertambah seiring jumlah produk jahe instant yang diproduksi oleh KWTH Semangat Baruga laku terjual di pasaran. Nantinya dana donasi ini sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk kelestarian kawasan hutan di sekitaran Desa Barugae sesuai dengan VISI dari KWTH Semangat Baruga itu sendiri, bahkan untuk memperkuat VISI tersebut, KWTH Semangat Baruga mendorong Pemerintah Desa Barugae untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Barugae untuk membuat Peraturan Desa (PERDES) tentang Perlindungan Hutan pada Zona Tradisional di Wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros seluas 129, 13 Ha.

KWTH semangat Baruga, juga telah melakukan upaya pelestarian kawasan hutan dengan cara membuat demplot kebun jahe organik tanpa harus berpindah-pindah dari lahan satu kelahan lainnya, hal ini dilakukan oleh KWTH semangat Baruga dikarenakan, masih adanya sebagian oknum masyarakat yang melakukan pembukaan lahan untuk dijadikan kebun jahe. Dengan metode budi daya menggunakan mulsa dan bahan pupuk organik, dan hasil yang lebih baik dengan cara berpindah-pindah lahan, KWTH semangat baruga berharap kebiasaan lama yang dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar kawasan dapat beralih ke metode mulsa dengan bahan organik.

Melihat dari hasil kemajuan Kelompok Wanita Tani Semangat Baruga dalam usaha penjualan produk berupa minuman herbal berbahan jahe dari waktu ke waktu mengalami peningkatan penjualan produknya, di awal tahun 2021, Pemerintah Desa Barugae, melalui BUMDES merasa tertarik untuk melakukan investasi modal dengan menggelontorkan dana BUMDES sebesar Rp100.000.000,00 kepada KWTH Semangat Baruga, dana dari BUMDES tersebut nantinya digunakan oleh BUMDES untuk membeli hasil produk yang telah dibuat oleh KWTH Semangat Baruga untuk dipasarkan oleh BUMDES Desa Barugae, sehingga anggota KWTH Semangat Baruga hanya fokus dalam hal menjaga kualitas produk dan terus meningkatkan jumlah produk.

Tepat di bulan Februari 2020, lahirlah Peraturan Desa (PERDES) Nomor: 24/BRG-ML/KPTS/02/2020 tentang Perlindungan Hutan pada Zona Tradisional di Wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Desa Barugae Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros seluas 129, 13 Ha yang ditandatangani oleh Kepala Desa Barugae.

Selain KWT, Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung juga membina Kelompok Tani Hutan (KTH) Sember di Desa Samanrae. Berbeda dengan KWT Semangat Baruga, KTH Sember di bantu untuk mengembangkan Jamur Tiram. Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung mengirimkan beberapa petani ke Lombok Tengah untuk belajar membuat kultur jaringan F0 Bibit Jamur Tiram serta memfasilitasi pelatihan cara membuat kultur jaringan bibit F0 secara menyeluruh bagi 30 anggota KTH SAMBER. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung memberikan pelatihan teknik pengolahan produk jamur tiram menjadi keripik jamur tiram, abon jamur tiram, sate jamur tiram, dan teknik pelabelan produk jamur tiram serta cara penyusunan dokumen administrasi kelompok sampai pada proses pendampingan sertifikat produk halal dari MUI dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dari Kementerian Kesehatan Kabupaten Maros. Kesuksesan memproduksi berbagai macam makanan dari jamur tiram, selain meningkatkan pendapatan anggota KTH, KTH Sumber ditanjar

penghargaan peringkat ke 2 tingkat Nasional kategori penghargaan kelompok tani hutan berprestasi dalam bidang usaha HHBK.

Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah-langkah Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang mana melibatkan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan pemberdayaan masyarakat, selain akan menjaga kawasan taman nasional juga meningkatkan pendapatan keluarga, sehingga perlu didukung oleh stakeholder lain seperti pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan sektor swasta. Komisi IV DPR RI juga mendorong Kelompok Wanita Tani yang ada untuk didaftarkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Maros agar mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian yang juga mitra Komisi IV DPR RI.

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung didampingi Sekretaris Dirjen KSDAE mewakili Dirjen KSDAE, Bupati Maros, Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dan beberapa UPT lingkup KLHK yang ada di Sulawesi Selatan.

## **BIDANG PERTANIAN**

### **Kunjungan ke Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang, Kec. Panakukang, Kota Makassar.**

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu lumbung beras terbesar di Indonesia. Sulawesi Selatan jadi provinsi terbanyak yang memproduksi padi pada tahun 2020 di luar Jawa. Capaian tersebut tidak lepas dari data luas panen padi yang dipertahankan Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun, meski mengalami tren penyusutan.

Peningkatan produksi beras bukan tidak menimbulkan masalah. Masalah utama yang timbul adalah keterbatasan sarana penyimpanan, yaitu gudang dan sarana penggilingan. Kelebihan pasokan ketika panen raya harus dicarikan solusinya bersama, agar tidak terjadi penurunan mutu ketika disimpan dan sampai ke masyarakat.

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Gudang Bulog, khususnya Pabrik *Rice To Rice* di Sulawesi Selatan adalah untuk melihat upaya dan peran serta Bulog dalam penyerapan, penyimpanan, dan penyaluran beras atau gabah

dalam rangka ketahanan serta pengadaan beras Pemerintah yang bersumber dari dalam negeri.

Tabel Realisasi Pengadaan Beras Negeri Kantor Wilayah Seluruh Indonesia Tahun 2020 dan 2021

No	Kanwil	Target 2020 (Str Beras)		Total realisasi str beras	%	Target 2021 (Str Beras)		Total realisasi *)	%
		Jan-Des	Jan-Okt			Jan-Des	Jan-Okt		
1	DKI JAKARTA & BANTEN	57.800	39.933	63.749	110,29%	53.000	41.000	29.695	56,03%
2	JABAR	213.400	197.576	161.004	75,45%	270.000	245.200	111.158	41,17%
3	JATENG	173.800	156.921	98.457	56,65%	204.000	190.150	122.434	60,02%
4	DI. YOGYA	53.000	45.621	51.682	97,51%	74.000	70.800	47.638	64,38%
5	JATIM	208.900	195.902	157.524	75,41%	331.000	304.900	130.626	39,46%
6	ACEH	17.500	15.637	21.666	123,81%	12.600	10.400	11.199	88,88%
7	SUMUT	20.400	15.223	44.579	218,53%	27.500	20.700	18.320	66,62%
8	RIAU & KEPRI	19.500	12.837	6.980	35,79%	14.500	11.000	6.336	43,69%
9	SUMBAR	15.700	10.384	4.594	29,26%	11.000	8.300	2.105	19,14%
10	JAMBI	9.200	6.722	21.348	232,04%	8.000	6.450	10.023	125,29%
11	SUMSEL & BABEL	84.500	66.451	73.520	87,01%	109.000	100.700	63.237	58,02%
12	BENGKULU	3.600	2.788	11.661	323,92%	6.500	5.200	4.548	69,98%
13	LAMPUNG	85.000	72.303	65.904	77,53%	108.000	100.200	38.628	35,77%
14	KALBAR	16.300	10.683	12.414	76,16%	8.500	6.400	3.445	40,53%
15	KALTIM & KALTARA	5.800	4.334	7.229	124,64%	8.000	6.500	2.710	33,87%
16	KALSEL	18.100	16.189	10.120	55,91%	18.500	16.200	10.482	56,66%
17	KALTENG	4.600	3.627	7.688	167,13%	7.500	6.300	4.174	55,65%
18	SULUT & GORONTALO	5.700	3.813	3.449	60,51%	6.000	4.650	1.551	25,86%
19	SULTENG	20.000	18.293	18.614	93,07%	31.300	28.850	10.675	34,10%
20	SULTRA	24.500	20.558	30.005	122,47%	45.700	43.200	17.268	37,79%
21	<b>SULSELBAR</b>	<b>225.200</b>	<b>192.075</b>	<b>275.588</b>	<b>122,37%</b>	<b>303.000</b>	<b>278.200</b>	<b>295.263</b>	<b>97,45%</b>
22	BALI	6.000	3.928	6.117	101,96%	7.100	5.550	5.945	83,73%
23	N.T.B	70.200	66.377	60.147	85,68%	127.000	117.800	100.679	79,27%
24	N.T.T	7.400	5.381	13.655	184,53%	10.500	8.550	6.201	59,06%
25	MALUKU & MALUT	3.400	2.590	2.432	71,54%	6.200	5.050	330	5,32%
26	PAPUA & PABAR	30.500	28.574	26.378	86,49%	41.600	36.150	16.163	38,85%
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.214.719</b>	<b>1.256.507</b>	<b>89,75%</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.678.400</b>	<b>1.070.834</b>	<b>57,88%</b>

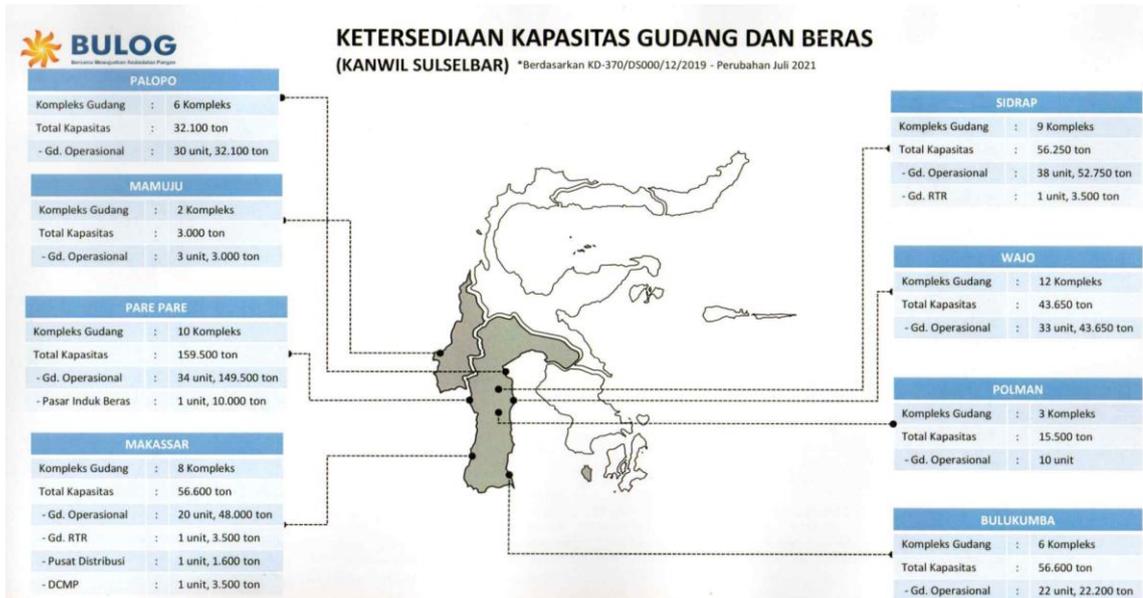
Update per 12 Oktober 2021

Pengadaan Beras di Kanwil Sulselbar sejak 2020 s.d. 2021 termasuk yang tinggi secara nominal dan persentasenya.

(dalam ton)

NO	KANTOR WILAYAH/KANTOR CABANG/KANTOR CABANG PEMBANTU	2020			2021		
		TARGET	REALISASI	% REAL vs TARGET	TARGET	REALISASI *)	% REAL vs TARGET
1	KANWIL SULSEL	-	-	0,00%	-	-	0,00%
2	KANCAB POLMAS	14.863	13.465	90,59%	20.000	16.198	80,99%
3	KANCAB PARE-PARE	38.622	67.515	174,81%	55.000	66.451	120,82%
4	KCP PINRANG	27.474	55.946	203,63%	43.500	39.576	90,98%
5	KANCAB SIDRAP	40.536	53.336	131,58%	58.000	51.018	87,96%
6	KCP SOPPENG	11.260	10.396	92,33%	15.000	9.276	61,84%
7	KANCAB WAJO	25.110	21.001	83,64%	25.000	16.073	64,29%
8	KCP BONE	10.922	12.752	116,75%	18.000	23.125	128,47%
9	KANCAB BULUKUMBA	19.142	12.482	65,21%	21.000	16.213	77,20%
10	KCP SELAYAR	563	150	26,64%	500	36	7,18%
11	KANCAB PALOPO	16.440	13.018	79,19%	18.500	13.519	73,08%
12	KANCAB MAKASAR	15.764	13.239	83,98%	22.000	39.784	180,84%
13	KANCAB MAMUJU	4.504	2.288	50,79%	6.500	3.995	61,46%
	<b>TOTAL</b>	<b>225.200</b>	<b>275.588</b>	<b>122,37%</b>	<b>303.000</b>	<b>295.263</b>	<b>97,45%</b>

\*) per 12 Oktober 2021 (closing)



Dalam rangka implementasi Perpres Nomor 48 Tahun 2016 Bulog perlu memiliki infrastruktur yang modern dan besar dari hulu ke hilir. Oleh karena itu Bulog merumuskan strategi pembangunan Infrastruktur sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur dilakukan di daerah sentra produksi bahan baku (beras, jagung, kedelai) Indonesia.
2. Pembangunan Infrastruktur dilakukan pada lokasi yang telah mempunyai fasilitas penunjang lainnya seperti listrik.
3. Pembangunan MRPMP, RTR, dan CDC dilakukan di lokasi yang telah memiliki infrastruktur seperti gudang penyimpanan untuk menjaga kualitas produk selama penyimpanan.
4. Pembangunan Gudang Komoditas Pangan diutamakan pada daerah yang sulit untuk penyediaan dan penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan kapasitas dan lokasi masing-masing.
5. Pembangunan Gudang Modern dilakukan pada kota besar yang memiliki aktivitas belanja offline, online, dan kebutuhan pangan yang tinggi.

Bulog sudah mengalokasikan anggaran Rp2 Triliun untuk pembangunan infrastruktur di 52 lokasi seluruh Indonesia, yang terdiri dari 13 unit Modern *Rice Milling Plant* (MRMP), 7 unit *Rice To Rice* (RTR), 6 unit *Corn Drying*

Center (CDC), 2 unit Gudang Kedelai, 20 unit Gudang Komoditas Pangan (GKP), dan 4 unit Gudang Modern-Distribution Center (GM-DC).

Tabel Lokasi Pembangunan Infrastruktur di Bulog

No	Infrastruktur	Lokasi
1	<i>Modern Rice Milling Plant (MRMP)</i>	Jember, Banyuwangi, Sumbawa, Bojonegoro, Magetan, Subang, kendal, Sragen, Lampung dan Karawang.
2	<i>Rice to Rice</i>	Indramayu, Makassar, Sidrap, Jakarta, Sukoharjo, Lombok Timur, Sidoarjo.

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Bulog Sulawesi Selatan melihat fasilitas *Rice To Rice* (RTR) dan melakukan diskusi dengan jajaran Perum Bulog. Fasilitas RTR yang dikunjungi merupakan rangkaian mesin pengolahan beras yang terdiri dari sortasi, *destoning*, *whitening*, dan *grading* dengan kapasitas keseluruhan adalah 6 ton/jam untuk masing-masing lokasi. Fungsi dari RTR adalah membersihkan beras sebagai upaya meningkatkan mutu beras dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi dari beras asalan menjadi beras premium.



Ketua Tim Kunjungan Kerja sangat mengapresiasi teknologi mesin *rice to rice* yang ada di Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang, di Panakukang, Kota

Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui mesin tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan beras yang berkualitas dengan nutrisi yang tetap terjaga. Adanya mesin *rice to rice* ini yang memproses dari hasil panen petani yang (kualitas) biasa dijadikan premium dan itu menjadi konsumsi atau menjadi kebutuhan dari masyarakat.

Setelah melakukan peninjauan fasilitas RTR Bulog, Tim Kunjungan Kerja melakukan dialog dengan Direktur Perum Bulog dan Jajaran. Beberapa arahan dan pertanyaan dari tim kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, antara lain:

1. Berapakah biaya maintenance dan penyimpanan satu kg beras? Jangan sampai biaya yang dikeluarkan per kg lebih mahal dari biaya komersialnya.
2. Perlu perhatian dari Bulog perihal sentra-sentra beras dari daerah selatan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Bulog agar meningkatkan penyerapan beras di Sulawesi Selatan yang masih 10 persen saat ini. Bulog juga diharapkan mampu bersaing dengan produsen beras swasta.
4. Mendorong Bulog ke depan lebih banyak membangun fasilitas-fasilitas pengolahan beras yang terintergrasi untuk menekan biaya produksi.
5. Pembangunan *Rice To Rice* agar lebih banyak lagi di daerah-daerah sentra produksi beras di Indonesia, sebagai contoh di Banyuasin, sentra beras terbesar di Pulau Sumatera.

Menjawab dan menanggapi pertanyaan dan arahan dari anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI.

1. Biaya proses dan pengemasan kurang lebih Rp8.500,00, masih di bawah harga komersial.
2. Di Bulukumba ada rencana pembangunan fasilitas infrastruktur beras, namun karena lokasi berada di jalur pipa rencana pembangunan dibatalkan. Akan dijajakin lokasi alternatif, salah satunya di Kabupaten Bantaeng.

3. Panen beras di Sulawesi Selatan hampir setiap tahun dan Bulog terus melakukan penyerapan, namun permasalahannya adalah kurang maksimal dalam penjualan beras di hilir.
4. Untuk daerah-daerah produsen besar akan dibangun *Modern Rice Milling Plant* untuk memproduksi beras secara terintegrasi sedangkan di perkotaan akan dibuat Gudang *Modern-Distribution Center*.

### **Kunjungan ke Balai Penelitian Tanaman Serealia, Kabupaten Maros**

Balai Penelitian Tanaman Serealia sebagai sebuah Lembaga penelitian dimulai dari dibentuknya LPPM Makassar tahun 1929 yang merupakan cikal bakal perkembangan penelitian pertanian, khususnya di wilayah Negara Indonesia Timur (NIT). Pada jaman peralihan Kemerdekaan Indonesia antara tahun 1947 – 1949 berkembang pemikiran untuk integrasi lembaga penelitian, termasuk LPPM yang kemudian berubah nama menjadi Balai Besar Penyelidikan Pertanian (BBPP) Cabang Makassar. Perubahan organisasi terus berlangsung hingga pada tahun 1966 BBPP berganti nama menjadi LPPM. Seiring perkembangan jaman kebutuhan akan sarana penunjang semakin besar sehingga muncul ide pemindahan lokasi dari Makassar ke Kabupaten Maros.

Sejak tanggal 13 Desember 1994 melalui SK Mentan Nomor 797/Kpts/OT.210/12/94 Balittan Maros berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman Jagung dan Serealia Lainnya (Balitjas). Mandat penelitian yang sebelumnya meliputi komoditas padi dan palawija, menjadi lebih terfokus pada tanaman jagung dan serealia potensial lainnya seperti sorgum, gandum, serta jewawut. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.140/3/2013, nama Balai Penelitian Tanaman Jagung dan Serealia lainnya berubah menjadi Balai Penelitian Tanaman serealia (Balitsereal) dengan mandat komoditas yang sama.

Tahun	Perkembangan organisasi institusi	Keterangan
1929	Lembaga Penelitian Pertanian Makassar (LPPM)	Meliputi Negara Indonesia Timur (NIT),
1947	Lembaga Penelitian Pertanian Cabang BBPP Makassar	Dikordinir oleh BBPP
1949	Terbentuknya NKRI, Balai Penelitian Cabang BBPP Makassar resmi di kordinasikan BBPP	Kepala Balai Cabang BBPP Makasar (J.M. Hutagalung)
1966	Terbentuknya NKRI, Balai Penelitian Cabang BBPP Makassar resmi di kordinasikan BBPP	Diresmikan oleh Mentan RI, Brigjen Soetjipto SH 1966
1984	Lembaga Pusat Penelitian Pertanian (SK Mentan) R.I, No. 126/KPTS/OP/4/ 1969) Lembaga Penelitian Pertanian Makassar (LPPM)	Mandat komoditas Padi dan Palawija
1994	Balai Penelitian Tanaman Jagung dan Serealia Lainnya (Balittan Maros). SK Mentan No. 797/Kpts/OT.210/12/1994	Mandat komoditas jagung dan serealia lainnya
2013	Balai Penelitian Tanaman Serealia (Balittan Maros). SK Mentan No. 24/Permentan/OT.140/3/2013	Mandat komoditas tanaman serealia

Balitsereal bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Tahun 2017, Balitsereal kembali ditetapkan sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI) tanaman serealia oleh Kementerian Ristek Dikti dengan nomor SK 21/PU.IPTEK/XII/2017. Dengan ditetapkannya sebagai PUI maka Balitsereal menjadi lembaga rujukan Iptek dan sumber inovasi teknologi tanaman serealia di Indonesia.



### Program Penelitian

Program Penelitian dan Diseminasi Balitsereal terdiri dari lima program pokok dengan sub-sub program di dalamnya, diantaranya:

- A. Pengelolaan dan Pengembangan Plasma Nutfah Serealia.
  1. Koleksi, rejuvinasi, karakterisasi, dan evaluasi plasma nutfah.
  2. Pembentukan genotipe unggul baru jagung toleran kekeringan dan kemasaman tanah (QPM dan jagung biasa).

3. Perbaikan/pembentukan genotipe unggul baru jagung khusus: pulut, tepung, manis, dan biomas.
  4. Pengujian genotipe unggul baru jagung dengan pendekatan partisipatif.
- B. Perbaikan Teknologi dan Sistem Perbenihan serta Penanganan Hasil Panen Serealia.
1. Pembentukan dan pemantapan sistem perbenihan berbasis komunal.
  2. Teknologi dan sistem penanganan produk jagung untuk menekan kehilangan hasil.
- C. Peningkatan Efisiensi Pengelolaan Tanah, Hara, Tanaman, dan Organisme Pengganggu.
1. Pengelolaan hara, dan air untuk tanaman jagung.
  2. Formulasi dan teknologi produksi pestisida hayati dan nabati.
- D. Perbaikan dan Pengembangan Teknologi Budi Daya Unggul Serealia. Produksi jagung pada lahan sawah melalui pengelolaan sumber daya dan tanaman terpadu.
- E. Promosi dan komersialisasi teknologi dan jasa.
1. Penyebarluasan dan komersialisasi teknologi serealia.
  2. Studi karakterisasi, persepsi, dan sikap pengguna terhadap teknologi hasil penelitian. Dalam pelaksanaan program penelitian, Balitsereal ditunjang oleh berbagai fasilitas diantaranya:

**Sarana dan prasarana:**

1. Gedung Kantor, Rumah dinas, Mess dan Guest house.
2. Peralatan Kantor dan Lapangan.
3. Laboratorium Marka Molekuler.
4. Laboratorium Fisiologi Benih.

5. Laboratorium Tanah.
6. Laboratorium Hama dan Penyakit.
7. Laboratorium Pangan.
8. Screen House ( 13 Unit).
9. Green House (13 Unit).
10. Cold Storage (3 Unit).
11. Bengkel Alsintan.
12. Perpustakaan.
13. Jaringan Internet (wireless Wifi).

#### **Kebun Percobaan**

1. Kebun Percobaan Maros (100 Ha).
2. Kebun Percobaan Bajeng (42 Ha).
3. Kebun Percobaan Bontotbili (20 Ha).

Pada saat kunjungan tim kunjungan kerja juga berdialog dengan para peneliti dari Balai Penelitian Tanaman Serealia. Beberapa peneliti mengkhawatirkan status kepegawaiannya terkait adanya proses pemindahan Badan Penelitian di bawah Kementerian Pertanian yang akan dipindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain khawatir dengan status kepegawaiannya, peneliti Balitsereal juga khawatir dengan nasib penelitian di bidang pertanian kedepannya. Akan tetapi, Komisi IV DPR RI berharap peneliti harus dipertahankan di bawah Kementerian Pertanian serta tidak khawatir dengan adanya pemindahan tersebut. Anggota Komisi IV DPR RI juga berharap peneliti terus fokus melakukan penelitian untuk menghasil produk-produk pertanian yang mampu memajukan sektor pertanian.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan agar segera mengaktifkan Pelabuhan Perikanan Untia dan mengusulkan pembentukan organisasi di Pelabuhan Perikanan Untia kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Sehingga Pelabuhan Perikanan Untia

dapat dimanfaatkan dengan baik dan mampu memberikan dampak ekonomi kepada Masyarakat Sulawesi Selatan.

2. Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh relawan dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Jeneberang-Saddang. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan bibit-bibit mangrove berkualitas untuk mendukung kegiatan rehabilitasi mangrove termasuk di dalamnya insentif untuk relawan dan kelompok pelaksana.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadikan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung menjadi obyek wisata alam unggulan serta pusat konservasi kupu-kupu serta menjadi sentra edukasi kepada masyarakat luas.
4. Komisi IV DPR RI mengapresiasi upaya Balai Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung dalam melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional dalam menjaga kawasan konservasi. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui program kemitraan, pendampingan, dan bantuan ekonomi produktif.
5. Komisi IV DPR RI mengapresiasi teknologi mesin *rice to rice* yang ada di Gudang Bulog Baru (GBB) Panaikang, di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Perum Bulog untuk meningkatkan kinerjanya melalui penyerapan beras petani, intervensi dan inovasi pengelolaan beras dan distribusi beras ke masyarakat.
6. Komisi IV DPR RI mengapresiasi Balai Penelitian Tanaman Serelia (Balitsereal) milik Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian, terkait dengan produktivitas produksi bibit jagung yang tinggi produksi.
7. Komisi IV DPR RI mendorong agar seluruh penelitian dapat terus berkembang dan tidak berhenti serta Ditjen Tanaman Pangan, BPPT, dan seluruh komponen agar dapat memanfaatkan seluruh inovasi yang dihasilkan oleh Balitsereal.

8. Komisi IV DPR RI meminta agar adanya keputusan penggabungan Balai Penelitian ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dicari jalan tengah dan tidak mengganggu kinerja para peneliti yang produk penelitiannya diharapkan mampu memberikan solusi atas masalah-masalah disektor pertanian khususnya permasalahan jagung.

## V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 ke Sulawesi Selatan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak, baik dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja tersebut dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 15 Oktober 2021

Ketua Tim,

Ttd.

Anggia Erma Rini, MKM.

A-41

# LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi Acara**
- 2. Liputan Kegiatan di Media**

## Dokumentasi Acara





## Liputan Kegiatan di Media

1. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35302/t/Sinergi%2C+Kunci+Penyelesaian+Permasalahan+Pelabuhan+Perikanan+Untia>
2. <https://www.wartasulsel.id/2021/10/kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-2021.html>
3. <https://makassar.terkini.id/komisi-iv-dpr-ri-mengunjungi-kawasan-mangrove-untia-kota-makassar/>
4. <http://pdashl.menlhk.go.id/newsdetail.php?id=354-BPDASHL-Jeneberang-Saddang-Tanam-Mangrove-di-Pesisir-Untia,-Makassar-bersama-Anggota-DPR-RI-Komisi-IV>
5. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35316/t/Komisi+IV+Dukung+Pengembangan+Taman+Nasional+Bantimurung>
6. <https://makassar.terkini.id/kunker-komisi-iv-dpr-ri-di-tn-bantimurung-anggia-ini-tempat-yang-keren/>
7. <https://www.teras.id/news/pub-10/410037/komisi-iv-dpr-dukung-pengembangan-kerajaan-kupu-kupu-bantimurung>
8. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35314/t/Komisi+IV+Apresiasi+Teknologi+%E2%80%98Rice+To+Rice%E2%80%99+Bulog+Panaikan+g+Makassar>
9. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35320/t/Komisi+IV+Apresiasi+Produktivitas+Balitsereal+Maros+Sulawesi+Selatan>
10. <https://legion-news.com/komisi-iv-apresiasi-produktivitas-balitsereal-maros-sulawesi-selatan/>